

Tarif Diprotes, Kemenhub Bakal Survei Aspirasi Pengguna Ojol



BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, HanTer - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi akan melakukan survei untuk memastikan kebenaran aspirasi masyarakat mengenai aturan baru ojek daring (online). Ia tak ingin aturan ini kembali dimentahkan oleh Mahkamah Agung atas laporan oknum tertentu.

"Ini era baru, industrialisasi digital agar kita tidak dikelabui atau dibohongi orang," katanya, Kamis (2/5/2019).

Saat ini aturan tarif ojek daring pun diprotes beberapa pihak karena dinilai terlalu mahal dan membuat peminat sepi, padahal itu adalah usulan para pengemudi sendiri.

Sebagai informasi, Keputusan Menteri 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi baru berlaku di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

KP tersebut merupakan lanjutan dari Peraturan

Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

"Saya tidak lakukan masif. Kami lakukan di lima kota karena lima kota ini bisa menjadi barometer, mengenai bagaimana reaksinya mereka," katanya.

Menhub menyatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi tarif ojek daring pada pekan depan. "Kami akan mengevaluasi setelah tujuh hari berlaku karena ada masukan merasa enggak perlu dinaikkan karena kemahalan," katanya.

Ia mengklaim pihaknya sudah menyesuaikan tarif sesuai dengan tuntutan pengemudi dan kemampuan daya beli masyarakat. "Kalau kemarin kan waktu kita tetapkan mau jadi Rp2.000 atau Rp1.600, kan enggak mau, makanya kita ikuti, itupun Rp2.000 ini sudah turun dari ekspektasi mereka yang Rp2.500. Sudah turun, tapi masih ketinggian. Jadi kami lihat lagi," katanya.

■ Danial

OJK MINTA BEI VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN GARUDA

Kisruh hasil audit laporan keuangan maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, terus berlanjut. Kini, giliran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ikut menanggapi kisruh tersebut.

Jakarta, HanTer - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau overruled hasil audit laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia yang dilakukan akuntan publik.

"OJK tidak memiliki kewenangan untuk menolak hasil audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik, kebenaran itu tentunya nanti ada pada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi hal tersebut," ujar Wimboh kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya bukan melakukan pengawasan kepatuhan (compliance), seperti mengawasi bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. "Kami mengawasi da-



ILUSTRASI

lam konteks Garuda ini bukan lembaga jasa keuangan, kami mengawasi hanya bagaimana maskapai tersebut mematuhi prosedur dalam konteks transparansi dan market conduct dalam rangka laporan yang telah diaudit," katanya.

Dalam hal emiten yang terdaftar, Wimboh meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018.

"Jadi OJK meyakini bahwa transparansi perusahaan yang go public atau terbuka, kami meminta self regulatory organizations (SRO) dimana bursa efek melakukan hal tersebut di lapangan dan tentu nanti hasilnya bisa dilaporkan kepada OJK," kata Wimboh, dilansir dari Antara.

Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menhub akan

menunggu klarifikasi terkait laporan keuangan maskapai Garuda Indonesia 2018.

Selain itu ia mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan mencermati polemik ini bisa diatasi dan pihaknya akan memastikan bahwa Garuda bisa beroperasi dengan baik.

Sebelumnya dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan itu terkait perjanjian kerja

sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia, di mana diakui menjadi pendapatan perusahaan, karena apabila tanpa pengakuan pendapatan ini perseroan akan mengalami kerugian sebesar 244,95 juta dolar AS.

Namun manajemen PT Garuda Indonesia Tbk mengatakan kebijakan memasukkan piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan tahun 2018 tidak melanggar Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23.

■ Sammy

Pertamina Klaim Kurangi Impor Minyak Mentah hingga 50 Persen



ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - Selama empat bulan pertama 2019, impor minyak mentah dan kondensat Pertamina mengalami penurunan drastis hingga sekitar 50 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman mengatakan, volume impor minyak mentah dan kon-

densat Pertamina pada periode Januari hingga April 2019 mencapai sekitar 25 juta barel atau turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sekitar 48 juta barel.

Penurunan ini juga berdampak pada penurunan nilai biaya impor sebesar 1,4 miliar dolar AS atau ekuivalen lebih dari Rp20 Triliun.

"Penurunan impor sangat signifikan karena sebagian dari kebutuhan minyak mentah untuk kilang-kilang Pertamina sudah

dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan adanya penyerapan minyak mentah domestik ini, maka sangat mendukung kehandalan supply untuk kilang-kilang Pertamina sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas kilang," ujarnya, dilansir dari Antara, Kamis (2/5/2019).

Hingga minggu ketiga April 2019, Pertamina telah melakukan kesepakatan untuk pembelian minyak dan kondensat dalam negeri sebanyak 137 ribu barel per hari (MBCD) yang berasal dari 32 kon-

traktor kontrak kerja sama (KKKS).

Pembelian minyak dan kondensat domestik yang paling berpengaruh adalah bagian dari eks PT Chevron Pacific Indonesia untuk jenis Duri dan SLC, yang jumlahnya mencapai 2-3 juta barel per bulan. "Dengan pasokan tersebut, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor minyak mentah jenis heavy dan super heavy dan hanya mengimpor jenis light and medium crude," ungkapnya.

■ Arbi

Kuartal I-2019, Realisasi Investasi Capai Rp195 Triliun

Jakarta, HanTer - Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal I-2019 sebesar Rp195,1 triliun. Capaian ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp185,3 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong menjabarkan, nilai investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri



ILUSTRASI

(PMDN) para kuartal I itu tercatat sebesar Rp87,2 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp107,9 triliun.

"Nilai investasi kuartal pertama tersebut sudah mencapai 24,6 persen dari target investasi tahun 2019 sebesar Rp792 triliun," kata Thomas di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis (2/5/2019).

Menurutnya, capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi In-

donesia pada 2019 yang ditargetkan sebesar 5,3 persen dapat terrealisasi. Di sisi lain, pada periode realisasi investasi kuartal I 2019 ini juga telah berhasil menyerap sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, Thomas melanjutkan, pertumbuhan investasi PMDN meningkat sebesar 14,1 persen yaitu dari Rp76,4 triliun pada 2018 menjadi Rp87,2 triliun.

Sementara itu, investasi

PMA tercatat turun 0,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau dari Rp108,9 triliun menjadi Rp107,9 triliun.

"Terjadi tren positif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada kuartal IV 2018 adalah -11,6 persen menjadi -0,9 persen pada kuartal I 2019. Kami melihat tren positif ini akan berlanjut pada masa mendatang," ujar dia.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim prospek investasi di Indonesia masih positif hingga akhir 2019, meski jumlah investasi asing kembali menurun dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Optimisme ini ditopang oleh sejumlah indikator makro ekonomi, termasuk inflasi yang dinilai masih terjaga. "Lalu dari sisi indikator makro ekonomi yang lain baik dari moneter maupun fiskal juga terjaga secara baik," tuturnya.

■ Safari/Sammy



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset atau harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman atau pembiayaan yang akan diperoleh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan.
7. Lain - Lain.

CATATAN:

- 1) Yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di PT KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, adalah Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimira Jasa Korpora ("BAE").
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah Pemegang rekening yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB.
- 2) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan boleh sebagai pemegang kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
- 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor BAE, PT Adimira Jasa Korpora, KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, nomor telepon: (021) 29745222, nomor fax: (021) 29289961;
- 4) Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Direksi melalui BAE, selambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 5) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat.
- 6) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
- 7) Demi ketertiban rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Mei 2019
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT DELPHYS INDONESIA CONSULTING, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") pada tanggal 19 April 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui cara konversi utang Perseroan selaku Debitor kepada DELPHYS INC. selaku Kreditor, dan telah dinyatakan ke dalam akta notaris dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.
Jakarta, 03 Mei 2019
Direksi PT DELPHYS INDONESIA CONSULTING